



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : HOLDING BUMN - Parlemen Tunggu Pembahasan  
**Tanggal** : Jumat, 21 Oktober 2016  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 13

JAKARTA — Menjelang akhir 2016, Komisi VI DPR menyatakan belum ada sekalipun rapat antara parlemen dan Kementerian BUMN yang secara khusus membahas pembentukan holding BUMN. Padahal, berdasarkan rencananya, pemerintah ingin membentuk enam holding BUMN pada 2016. Komisi VI DPR ingin juga dilibatkan dalam pembahasan holding sebagai bagian dari pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif. Wakil Ketua Komisi VI DPR Azzam Azman Natawijana menyatakan pembentukan holding harus melibatkan parlemen karena hal tersebut menyangkut perubahan saham perusahaan milik negara. “Oleh karena itu, kami tidak tahu apakah holding ini menjadi baik atau menjadi sedang. Itu dalam pengawasan kami. Soalnya, kalau suatu saat holding itu jadi masalah untuk negara, siapa tanggung jawab?” katanya, Kamis (20/10). Azzam mengatakan pihaknya tidak bisa membahas holding BUMN dengan Kementerian BUMN karena adanya larangan Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri rapat bersama DPR. Menurutnya, pembahasan holding itu tidak bisa dibahas hanya bersama deputi menteri. Seperti diketahui, Rini dilarang oleh pimpinan DPR untuk mengikuti rapat bersama DPR karena persoalan PT Pelindo II (Persero) pada akhir 2015. Rini menjadi satu-satunya menteri di Kabinet Kerja yang dilarang rapat di DPR oleh parlemen. “Kalau kami belum mendengar dari Ibu Menteri soal holding, kami kan belum bisa kasih rekomendasi. Kan nggak bisa kita kasih rekomendasi dari hal yang tidak kita ketahui, walaupun kami punya kemampuan tetapi kan nggak bisa. Nggak boleh secara tata krama,” kata Azzam. (Yodie Hardiyana)